

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *State Auxiliary Body*

1. Pengertian Eksistensi

Soren Kierkegaard adalah pemikir pertama yang memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian sekarang dalam aliran eksistensialisme.

“Esensi” berarti yang ada, maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas, pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit. Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi atau berada berarti terus-menerus mengambil keputusan bebas, bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton belaka (Hardiman, 2007: 244-255).

Pengertian Eksistensi didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* Kementrian Pendidikan Nasional berarti, hal berada atau suatu keberadaan. (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>).

Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi-potensinya (Abidin Zaenal, 2007: 16).

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

a. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan mempunyai 5 (lima) tugas Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas yang pertama, melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas yang kelima, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Ermansjah, 2008 : 187).

b. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

Selain melakukan 5 (lima) tugas, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki beberapa kewajiban. Kewajiban-kewajiban tersebut antara lain :

- 1) Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
- 2) Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang

berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

- 3) Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- 4) Menegakkan sumpah jabatan.
- 5) Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Ermansjah, 2008: 196).

c. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:
 - (a) Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

- (b) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - (c) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
 - (d) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - (e) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
 - (f) Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- 2) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 3) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

- 4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (3) bahwa:

Ketentuan ini bukan diartikan penyerahan fisik melainkan penyerahan wewenang, sehingga jika tersangka telah ditahan oleh kepolisian atau kejaksaan maka tersangka tersebut tetap dapat ditempatkan dalam tahanan kepolisian atau tahanan kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menempatkan tersangka di dalam Rumah Tahanan tersebut.

- 5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 6) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:
- (a) Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak dilanjutkan.

- (b) Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - (c) Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
 - (d) Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
 - (e) Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
- 8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
- (a) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau

penyelenggara negara. Dalam penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (b) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
- (c) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

9) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (a) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.
- (b) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri.
- (c) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa.
- (d) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait.

- (e) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.
- (f) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait; dalam penjelasan Pasal 12 huruf f dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “tersangka atau terdakwa” adalah orang perorangan atau korporasi.
- (g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Dalam penjelasan Pasal 12 huruf g dijelaskan bahwa:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari penghilangan atau penghancuran alat bukti yang diperlukan oleh penyelidik, penyidik, atau penuntut atau untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar.

- (h) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

- (i) Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Dalam Penjelasan Pasal 12 huruf i dijelaskan bahwa:

Permintaan bantuan dalam ketentuan ini, misalnya dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penahanan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bantuan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara untuk menerima penempatan tahanan tersebut dalam Rumah Tahanan.

- 10) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- (a) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara.
- (b) Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
- (c) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan.
- (d) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (e) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum.

- (f) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

11) Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- (a) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
- (b) Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi.
- (c) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tindak diindahkan.

d. Perbandingan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Negara Lain

Di setiap negara di dunia, tidak ada satupun yang bebas dari perbuatan korupsi. Korupsi termasuk dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dan merupakan jenis kejahatan tertua. Perbuatan korupsi satu negara dengan negara-negara lainnya dari intensitas dan modus operandinya sangat tergantung pada kualitas

masyarakat, adat istiadat, dan sistem penegakan hukum di suatu negara (Akil Mochtar, 2006: 43).

Di Indonesia, lembaga khusus yang berwenang memberantas korupsi ialah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di negara lain seperti Malaysia, lembaga yang berwenang memberantas korupsi disebut Badan Pencegah Rasuah. Seperti halnya juga di Thailand, terdapat lembaga yang berwenang memberantas korupsi. Nama komisi pemberantasan korupsi di Thailand adalah NCCC (*Nation Counter Corruption Commision*). Kemudian lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong yang bernama ICAC (*Independent Commission Againts Corruption*). Perbandingan antara Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dengan Malaysia, Thailand, dan Hongkong ialah :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (BPR/Badan Pencegah Rasuah)

Dalam rangka membangun negara modern yang bebas korupsi, sejak tahun 1961 Malaya yang kemudian berkembang menjadi Malaysia, telah mempunyai undang-undang anti korupsi, yang pertama Undang-Undang Tahun 1961 yang bernama *Prevention of Corruption Act* atau Akta Pencegah Rasuah Nomor 57, kemudian diterbitkan lagi *Emergency Essensial Power Ordinance* Nomor 22 tahun 1970. Setelah itu dibentuk Badan Pencegah Rasuah (BPR) berdasarkan *Anti*

Corruption Agency Act tahun 1982. Sekarang telah berlaku *Anti Corruption Act Agency* 1997 yang selanjutnya disingkat ACA yang merupakan penggabungan ketiga undang-undang dan ordonansi tersebut (Andi Hamzah, 1991: 38).

Organisasi Badan Pencegah Rasuah Malaysia berada pada kantor Perdana Menteri langsung dibawahnya adalah Direktur Jenderal atau Ketua Pengarah BPR Malaysia dibantu 2 *deputy* yaitu Ketua Pengarah Operasi dan Ketua Pengarah Pencegahan yang diangkat oleh Yang Dipertuan Agung (Raja) Yang dipertuan Raja diangkat atas nasehat Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Raja Yang Dipertuan Agung Malaysia (Tumbur Ompu, 2012: 81).

Calon Yang Dipertuan Agung diambil dari pejabat publik bukan dari kalangan swasta apalagi dari kalangan LSM, juga bukan dari kalangan pensiunan pegawai negeri, karena masa jabatannya berakhir jika tiba masa pensiunnya sebagai pegawai negeri atau pejabat publik. Masa jabatan Ketua Pengarah BPR Malaysia ditentukan pada surat pengangkatannya, begitu pula berbagai prasyaratnya. Selama menjalani jabatannya, Ketua Pengarah BPR Malaysia berada di bawah naungan Yang Dipertuan Agung, tetapi tunduk kepada nasihat atau petunjuk Perdana Menteri. Ketua pengarah BPR

Malaysia dan pejabat lainnya adalah berusia lima puluhan tahun.

Terdapat beberapa perbedaan tugas dan wewenang BPR Malaysia dengan KPK di Indonesia. Penyedilkan pemberantasan korupsi di BPR Malaysia dilakukan oleh Bagian atau Divisi Intelijen yang disebut Perisikan *atau Intelligence Division* pada bagian dibawah Ketua Pengarah Operasi, bertujuan membangun intelijen yang mantap, lengkap dan tersusun melalui sistem jaringan sumber digabung dengan intelijen profesional. Bidang aktivitasnya adalah bertanggung jawab untuk melaksanakan intelijen yang sulit dan pengintipan dengan tujuan untuk mengamankan dan mengkonfirmasi informasi yang berhubungan dengan pengaduan adanya aktifitas korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Informasi yang diperoleh akan dijadikan asas intelijen dan penyidikan selanjutnya melalui sumber jaringan BPR Malaysia (Tumbur Ompu, 2012: 89).

Pemberantasan korupsi di Malaysia dilakukan dengan segala daya dan cara, represif yang keras, tegas, dibarengi sistem preventif dan hubungan masyarakat yang sangat intensif, didukung oleh *political will* yang prima dari pemerintah yang disertai dengan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Peraturan ACA juga sangat lengkap, walaupun

hanya dengan satu undang-undang telah mampu mencakup semua hal dengan rumusan delik yang jelas, keras, dan dijalankan dengan konsisten.

ACA (*Anti Corruption Act*) Malaysia mengatur hukum pidana materiil, hukum pidana formil, organisasi, wewenang, pengangkatan pejabat BPR Malaysia, wewenang penuntut umum, dan juga delik lain yang dapat disidik oleh BPR Malaysia. Delik lain tersebut ialah delik suap dalam *Penal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia, delik kepublikan, dan delik pemilihan umum (pemilihan raya). ACA juga mengatur ketentuan tentang disiplin pegawai negeri atau pejabat publik.

Pengaturan ACA meliputi sistem jaringan pencegahan korupsi dan hubungan masyarakat dalam bentuk propaganda anti korupsi kepada masyarakat, sampai kepada pengkajian Islam yang tujuannya demikian. Melihat sistem prevensi dan hubungan masyarakatnya, baik dalam arti aturan maupun penerapannya di lapangan, sistem BPR Malaysia tergolong baik. BPR Malaysia mengatur sangat detail segala hal mengenai pemberantasan korupsi (Ermansjah, 2010: 445).

Permasalahan BPR Malaysia ialah independensinya. Independensi BPR Malaysia kurang jelas dan tegas karena masih berada di bawah administrasi kantor Perdana Menteri

Malaysia. Selain itu mengenai sumpah jabatan pada waktu pejabat teras BPR Malaysia dilantik, susunan kalimatnya ditentukan oleh Perdana Menteri. Hal ini secara psikologis berarti BPR Malaysia harus setia kepada Pemerintah atau Perdana Menteri.

Masalah lain dari BPR Malaysia ialah bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya. Sebagai contoh, di Australia ICAC *New South Wales* bertanggung jawab melalui *Parliamentary Joint Committee* yang ada di parlemen. Demikian juga di Thailand, NCCC (*National Counter Corruption Commission*) bertanggung jawab kepada parlemen.

Di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi diatur pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan rumusan Pasal 20 tersebut berarti Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pertanggungjawabannya sudah diatur secara sistematis dan jelas, sehingga independensinya juga jelas (Ermansjah, 2010: 447-448).

2) Komisi Pemberantasan Korupsi Thailand (NCCC/*Nation Counter Corruption Commision*)

Thailand adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbeda dengan negara-negara tetangganya seperti Vietnam,

Laos, Kamboja, Burma, Malaysia, dan Indonesia. Perbedaanannya ialah, Thailand tidak pernah dijajah oleh negara barat. Setelah terjadinya *coup d'etat* yang berhasil menggulingkan kerajaan absolut pada tahun 1932 yang dilakukan oleh militer, sampai tahun tujuh puluhan Thailand di bawah kekuasaan rezim militer. Pada akhirnya pada tahun 1973 dengan demonstrasi besar-besarnya yang dilakukannya oleh mahasiswa dan pelajar Thailand, berhasil membawa Thailand ke sistem pemerintahan demokrasi.

Pembangunan di Thailand terus berlanjut dengan disertai upaya keras untuk memberantas korupsi yang telah merajalela sejak kediktatoran rezim militer. Sebelum tahun 1975, penyidikan dan pemberantasan korupsi dilakukan oleh penegak hukum kepolisian, dan pengawasan dilakukan di dalam badan-badan secara sistem pengawasan melekat sebagaimana di Indonesia dilakukan oleh inspektorat jenderal pada masing-masing departemen. Adapun undang-undang yang diterapkan adalah undang-undang hukum pidana umum dan peraturan kepegawaian yang ditambah dengan beberapa delik-delik korupsi yang berkaitan dengan penegakan hukum bidang pemberantasan korupsi.

Rakyat Thailand banyak melihat para pejabat mencari kekayaan dengan melakukan korupsi karena memanfaatkan

jabatan publik yang dipegangnya. Mereka yang ingin memberantas korupsi justru tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, bahkan banyak yang justru tersingkir dari jabatannya. Di sisi lain, bukan hanya undang-undang pemberantasan korupsi yang kurang lengkap tetapi, ada tekanan dari kekuatan tertentu yang menekan dan mengintimidasi para penyidik pemberantasan korupsi, sehingga tugas yang dijalankan tidak efektif dan efisien. Adanya suatu kesadaran bahwa racun korupsi muncul dalam kebijakan negara, ini terdapat dalam konstitusi Thailand 1974, Pasal 66 yang menyatakan bahwa negara harus mengorganisasikan sistem yang efisien dalam tugas-tugas pelayanan pemerintahan dan pekerjaan lain dari negara dan harus mengambil segala langkah untuk mencegah serta memberantas korupsi (Ermansjah, 2010: 463-465).

Di Thailand, ada empat pejabat tinggi negara yang memprakarsai pemberantasan korupsi yaitu Profesor Sanya Dhamasakti, Perdana Menteri, Mayor Jenderal Polisi *Atthasit*, dan Menteri dalam Negeri bersama-sama dengan anggota parlemen. Mereka telah melakukan penyusunan undang-undang pemberantasan korupsi yang diberi nama *Counter Corruption Act*, 1975. NCCC bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, sama seperti di Malaysia dan Hongkong (*Chief Executive*).

Kemudian kinerja dari NCCC ternyata kurang efektif, dikarenakan kewenangannya yang sangat terbatas dan disertai sistem pertanggungjawaban yang tidak independen yang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam *Counter Corruption Act*, 1975, 1978. Selanjutnya pada tanggal 8 November 1999 diterbitkan undang-undang baru tentang pemberantasan korupsi bernama *Organic Act on Counter Corruption*, dan komisi pemberantasan korupsi dibentuk dan diberi nama NCCC (*The National Counter Corruption Commision*) yang ketuanya disebut *President*. NCCC terdiri atas seorang ketua, dan delapan anggota yang terdiri dari satu sekretaris jenderal, dua asisten sekretaris jenderal, empat deputi sekretaris jenderal yang diangkat oleh Raja dengan nasehat dari Senat, dan pertanggungjawabannya langsung kepada Raja (Ermansyah, 2009: 373). Presiden NCCC berasal dari pensiunan berusia 70 tahunan, yang juga direkrut dari kalangan pejabat publik atau mantan pejabat publik, jadi dari kalangan yang berpengalaman di bidang administrasi negara. Di Thailand secara formal tidak ada kaitan antara Perdana Menteri dan Presiden NCCC Thailand. NCCC Thailand dapat menyidik Perdana Menteri, seperti yang pernah dilakukan di antaranya terhadap Perdana Menteri Thaksin.

Tugas dan kewenangan NCCC di Thailand mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan tugas dan kewenangan KPK di Indonesia. Persamaan tugas dan kewenangan NCCC Thailand dengan KPK di Indonesia yaitu mengambil tindakan untuk mencegah korupsi dan membangun sikap berkaitan dengan integritas dan kejujuran dalam mengambil tindakan untuk memberantas korupsi. Selain persamaan itu, NCCC Thailand melakukan pemeriksaan fakta-fakta kasus yang di Indonesia disebut dengan penyelidikan. Dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, NCCC Thailand masih melibatkan kepolisian dan kejaksaan sama seperti KPK di Indonesia. Jikalau terdapat unsur korupsi maka NCCC Thailand langsung melaporkan kepada senat supaya pejabat itu dipecat dan unsur korupsinya diajukan ke Kejaksaan Agung untuk diajukan penuntutannya ke Pengadilan. Pemberantasan korupsi melalui NCCC di Thailand termasuk berhasil menurunkan tingkat korupsinya (Tumbur Ompu, 2012: 104)

NCCC Thailand memiliki dua hal yang sangat baik yang tidak terdapat pada komisi pemberantasan korupsi di negara lain. Dua hal tersebut yaitu tentang pengangkatan dan tanggung jawab NCCC Thailand yang sangat rapi dan terperinci. Pengangkatannya melalui penjurangan yang sangat ketat oleh

Komisi Seleksi Anggota NCCC Thailand yang sangat independen, sehingga secara formil, yang paling baik dalam sistem pengangkatan dan rekrutmen pejabat komisi pemberantasan korupsi adalah Thailand.

Pertanggungjawaban NCCC Thailand juga sangat independen, yaitu langsung kepada Raja, karena berbeda dengan BPR Malaysia yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri (Ermansjah, 2010: 474). Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Indonesia berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertanggung jawab kepada:

- (a) Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (b) Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - (1) Wajib audit terhadap kinerja dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan program kerja.
 - (2) Menerbitkan laporan tahunan.

(3) Membuka akses informasi (Himpunan Peraturan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 2004: 137-138).

3) ICAC (*Independent Commission Against Corruptions*)
Hongkong

ICAC (*Independent Commission Against Corruption*) Hongkong dibentuk pada tanggal 17 Oktober 1973 oleh Gubernur Hongkong. Sebelumnya ICAC Hongkong bertanggung jawab kepada Gubernur, tetapi sekarang bertanggung jawab kepada *Chief Executive* Hongkong SAR (*Special Administrative Region*). ICAC Hongkong dipimpin oleh *Commissioner* dan dibantu oleh empat kepala divisi. Kepala divisi-divisi tersebut ialah *Operation Departement*, *Corruption Prevention Departement*, *Community Relations Departement*, *Administration Branch*.

Integritas *commissioner* dan ketiga kepala divisi serta pejabat lain sangat tinggi. Mereka diangkat melalui seleksi ketat dan mengikuti pelatihan khusus. Begitu pula sistem penggajiannya di atas gaji pegawai negeri. Jumlah pegawainya juga lebih banyak dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Hongkong. Di tahun 1999, jumlah pegawai ICAC Hongkong sebanyak 1.299 orang. Jumlah tersebut terbagi dalam 943 pegawai bidang operasi, 58 pegawai bidang

prevensi, 212 pegawai bidang hubungan masyarakat, dan 86 pegawai bidang administrasi (Ermansjah, 2013: 402-403).

Salah satu faktor dibentuknya ICAC Hongkong dan dihapusnya kantor anti korupsi di kepolisian karena berhasilnya Peter Godber meloloskan diri keluar negeri ketika masih berlakunya ACO (*Anti Corruption Office*). Alasan kepolisian tidak bersedia menangkap Peter Godber karena ada korupsi terorganisasi di lingkungan kepolisian Hongkong. Jika negara lain memulai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi karena korupsi telah meluas, tetapi Hongkong membentuk ICAC dalam keadaan dimana para hakim masih bersih dari korupsi. Korupsi di Hongkong hanya merajalela di kalangan kepolisian (Tumbur Ompu, 2012: 71).

Pembentukan ICAC Hongkong sebagai badan khusus yang independen pada tahun 1973 hingga sekarang hampir berumur 42 tahun dan tetap diperlukan serta dipertahankan karena kinerjanya sangat berhasil dalam memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi di Hongkong telah sepenuhnya ditangani ICAC Hongkong dengan tidak melibatkan kepolisian, hanya dalam hal penuntutan masih dilakukan oleh penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong. Perbedaannya dengan di Indonesia, KPK Indonesia dalam pelaksanaan penuntutan tetap

dilakukan penuntut umum. Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia masih melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

Indrianto Seno Adji (2009: 178) berpendapat bahwa di antara negara-negara berkembang, Hongkong yang memiliki Komisi Independen yang dianggap berhasil memberantas korupsi. *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong memiliki kharisma. Oleh karena itu keberadaan ICAC Hongkong tetap dipertahankan oleh Hongkong SAR sebagai Institusi pemberantasan korupsi di Hongkong. ICAC Hongkong dapat dikatakan sukses dalam pemberantasan korupsi dan dijadikan contoh oleh negara-negara lain.

Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

- (a) Adanya *political will* pemerintah, baik pada zaman kolonial Inggris maupun pada zaman Hongkong SAR yang melanjutkannya dengan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi, baik lewat cara represif maupun preventif dan pendidikan kepada masyarakat.
- (b) Terjamin integritas dan kejujuran para hakim saat ICAC Hongkong dibentuk.
- (c) Disediakan *budget* atau anggaran operasional ICAC Hongkong yang sangat besar.

(d) ICAC menggunakan teknologi canggih dalam melaksanakan semua kegiatan.

(e) Masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Perbedaan kewenangan ICAC Hongkong dengan KPK Indonesia ialah tentang penyelidikan. Penyelidikan pada KPK Indonesia tidak dilakukan oleh Badan Intelijen tetapi dilakukan oleh Direktorat Penyelidikan dalam Deputy Bidang Penindakan. Penyidik KPK Indonesia hanya dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan pada sektor publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pihak swasta yang menjalankan kepentingan publik. Berbeda dengan di Hongkong, ICAC dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan pihak swasta dan pemerintah tidak ada pengecualian. ICAC Hongkong memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi terlepas dari kepolisian, sedangkan KPK Indonesia masih melibatkan kepolisian dan kejaksaan dalam penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan perkara korupsi KPK Indonesia dapat melakukan penuntutan langsung sebagai penuntut umum sendiri, tetapi ICAC Hongkong dalam penuntutan dilimpahkan kepada penuntut umum Kejaksaan Agung Hongkong.

e. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Independen

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama

empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahi empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan (<http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-kpk>).

Dalam hal struktur kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lebih tinggi dari Kejaksaan maupun Kepolisian. Independensi KPK dilihat dari segi fungsionalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari segi fungsi KPK ini, dan sebagai bagian dari *constitutional importance* KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi juga independen

dalam hal personal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. *State Auxiliary Body*

Sebelum perubahan UUD1945, biasa dikenal adanya istilah lembaga pemerintah, lembaga departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, lembaga tinggi negara, dan lembaga tertinggi negara. Dalam hukum tata negara biasa dipakai pula istilah yang menunjuk kepada pengertian yang lebih terbatas, yaitu alat perlengkapan negara yang biasanya dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (Jimmly, 2010: 37).

Salah satu konsekuensi dari dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah munculnya beragam penafsiran mengenai lembaga negara, akibat kekurangjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengatur lembaga negara. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya kriteria untuk menentukan apakah suatu lembaga dapat diatur atau tidak dalam konstitusi. Ditinjau dari berbagai penafsiran yang ada, salah satunya adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary body*). Lembaga negara utama mengacu kepada paham *trias politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Dengan

menggunakan pola pikir ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dengan demikian, lembaga-lembaga lain yang tidak termasuk kategori tersebut merupakan lembaga negara yang independen. (<http://blog.unsri.ac.id/download/4770.pdf>).

Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara jelas memposisikan diri sebagai salah satu dari tiga lembaga *trias politica* mengalami perkembangan pada tiga dasawarsa terakhir abad ke 20 (dua puluh) di negara-negara yang telah mapan berdemokrasi. Istilah *state auxiliary body* oleh para pakar dan sarjana hukum tata negara diartikan berbeda. *State auxiliary body* lebih tepat diartikan sebagai “lembaga negara independen”. Di sisi lain M. Laica Marzuki cenderung mempertahankan istilah *state auxiliary institutions* untuk menghindari kerancuan dengan lembaga lain yang berkedudukan di bawah lembaga negara konstitusional (<http://wwwpsikologcint.blogspot.co.id/2013/02/memperkuat-eksistensi-kpk-sebagai.html>). Kedudukan lembaga-lembaga ini

tidak berada dalam ranah cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Lembaga negara independen sekilas memang menyerupai NGO (*Non Government Organization*) karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif. Walaupun demikian dilihat dari keberadaannya yang bersifat publik, sumber pendanaan yang berasal dari publik, serta bertujuan untuk kepentingan publik, membuatnya tidak dapat disebut sebagai NGO dalam arti sebenarnya. Sebagian ahli tetap mengelompokkan lembaga independen semacam ini dalam lingkup kekuasaan eksekutif, namun terdapat pula beberapa sarjana yang menempatkannya secara tersendiri sebagai cabang keempat dalam kekuasaan pemerintahan. Secara teoretis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk membuat lembaga negara baru yang pengisian anggotanya diambil dari unsur non negara, diberi otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Gagasan lembaga negara independen sebenarnya berawal dari keinginan negara yang sebelumnya kuat ketika berhadapan dengan masyarakat, rela untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi. Jadi, meskipun negara masih tetap kuat, lembaga ini diawasi oleh masyarakat sehingga tercipta akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Munculnya *state auxiliary body* dimaksudkan pula untuk menjawab tuntutan

masyarakat atas terciptanya prinsip-prinsip demokrasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan melalui lembaga yang akuntabel, independen, serta dapat dipercaya. Selain itu, faktor lain yang memicu terbentuknya lembaga negara ini adalah terdapatnya kecenderungan dalam teori administrasi kontemporer untuk mengalihkan tugas-tugas yang bersifat regulatif dan administratif menjadi bagian dari tugas lembaga independen.

Berkaitan dengan sifatnya tersebut, John Alder mengklasifikasikan jenis lembaga ini menjadi dua, yaitu *regulatory*, yang berfungsi membuat aturan serta melakukan supervisi terhadap aktivitas hubungan yang bersifat privat, dan *advisory*, yang berfungsi memberikan masukan atau nasihat kepada pemerintah(<http://farizpradiptalaw.blogspot.com/2009/12/kedudukan-lembaga-negara-bantu-didalam.html>).

B. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

1. Pengertian Sistem

Lani Sidharta berpendapat bahwa, sistem merupakan himpunan dari bagian-bagian yang saling berhubungan yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama. Kemudian menurut Pamudji (Syafiie, 2003: 1) pengertian sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang

membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh.

Sistem adalah keseluruhan bagian yang saling mempengaruhi satu sama lainnya menurut rencana yang telah ditentukan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian menurut Shorde, Votch dan Satjipto Rahardjo (Mustafa, 2003: 4-5) bahwa :

Sistem ini mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai tercampur begitu saja. Yang pertama adalah pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjukan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

John Mc Manama berpendapat bahwa, sistem yaitu sebuah struktur konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien. Kemudian menurut Winterton dalam Peter de Cruz yang diterjemahkan oleh Narulita Yusron yaitu, sistem hukum merupakan sekumpulan peraturan dan institusi dari suatu negara, sedangkan arti sistem hukum lebih luas adalah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh sejumlah negara, dimana sistem hukumnya memiliki kesamaan secara umum (de Cruz, 2010: 4-5). Menurut Sudikno Mertokusumo (Efran Helmi Juni, 2012: 275) sistem hukum adalah tatanan tentang

apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem yang normatif.

Sistem hukum Indonesia merupakan suatu kesatuan hukum yang berdasarkan pada Pancasila, berlaku di seluruh Indonesia, dibentuk untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebab di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar terdapat tujuan, dasar, dan cita-cita hukum Indonesia. Di dalamnya mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

2. Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tentang dasar dan tujuan negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, struktur organisasi kekuasaan negara dan pembagian wewenang serta tugasnya, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta hak-hak dan kewajiban warga negara. Hukum tata negara menurut kamus hukum adalah keseluruhan dari norma-norma hukum yang mengatur bagaimana negara harus dibentuk, pemerintahan negara harus diselenggarakan, badan-badan pemerintahan, perundang-undangan dan peradilan harus disusun dengan penentuan kekuasaan-kekuasaan masing-masing badan itu dan hubungan

kekuasaan antara satu sama lain (Subekti dan Tjitrosoedibio, 1973: 54).

Menurut Hans Kelsen, hukum tata negara adalah hukum mengenai “*der wohlende staat*”, yang memberi bentuk negara, hal mana tercantum dalam undang-undang dasarnya (Kansil dan Christine, 2008: 21). Pendapat Mr. W. F. Prins mengenai hukum tata negara bahwa hukum tata negara menentukan aparatur negara yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat.

Van Vollenhoven (Sugiarto, 2013: 248) memberikan definisi hukum tata negara ialah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan (*organ*) negara dengan memberikan wewenang kepada alat perlengkapan negara itu, untuk membagikan tugas pemerintahan kepada berbagai alat-alat perlengkapan negara yang lebih tinggi maupun yang rendah. Selanjutnya menurut CW Van Der Pot dalam Kartasapoetra (1987: 2) berdasarkan bukunya “*Handboek van Het Nederlands Staatsrecht*”, memberi batasan Hukum Tata Negara yaitu hukum mengatur semua masyarakat hukum tingkat atasan dan bawahan, yang selanjutnya menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, menentukan badan-badan yang berkuasa, berwenang dan berfungsi dalam lingkungan masyarakat hukum tersebut.

Kusmadi Pudjosewojo dalam bukunya dengan berdasarkan pada definisi yang diberikan Van Vollenhoven memberikan definisi hukum tata negara sebagai berikut (Kansil dan Christine, 2008: 22-23)

Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur bentuk negara dalam hubungan kesatuan atau federal dan bentuk-bentuk pemerintah dalam hubungan kerajaan atau republik yang menunjuk masyarakat-masyarakat hukum yang atasan dan masyarakat hukum yang bawahan beserta tingkatan imbangannya (*hierarchie*) yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan dari masyarakat hukum itu, dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan negara yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat-masyarakat hukum itu beserta susunan, wewenang tingkatan imbangannya dari dan antara alat-alat perlengkapan itu.

Berkaitan dengan hukum tata negara, maka menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tujuan hukum tata negara pada hakikatnya adalah sama dengan tujuan hukum, oleh karena itu sumber utama hukum tata negara adalah konstitusi. Tujuan konstitusi adalah mengadakan tata tertib dalam berbagai lembaga negara dan wewenangnya serta cara bekerjanya dalam hal penyebutan hak-hak asasi manusia yang harus dijamin perlindungannya.

3. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Tata negara berarti sistem penataan negara, yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan (Jimly, 2009: 15). Negara adalah suatu organisasi yang

meliputi wilayah, sejumlah rakyat, dan mempunyai kekuasaan berdaulat. Setiap negara memiliki sistem politik yaitu pola mekanisme atau pelaksanaan kekuasaan, sedangkan kekuasaan adalah hak dan kewenangan serta tanggung jawab untuk mengelola tugas tertentu. Pengelolaan suatu negara inilah yang disebut dengan sistem ketatanegaraan.

Dalam suatu negara selalu terdapat orang-orang atau badan-badan yang memegang kekuasaan (Pudjosewojo, 2004: 112). Orang-orang dan badan-badan itu, berdasarkan pembagian kekuasaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Pembagian kekuasaan berarti bahwa orang-orang dan badan-badan itu masing-masing, dalam rangka tujuan yang sama, mempunyai kekuasaan tertentu.

Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa berbagai perubahan yang signifikan bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Berbagai perubahan itu diantaranya, penegasan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum, perubahan sistem hubungan pusat dan daerah, muncul lembaga-lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pimpinan Pusat, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, menimbulkan perubahan untuk memenuhi kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks dan rumit. Akibat dari

perubahan ketatanegaraan adalah munculnya fungsi-fungsi kekuasaan yang biasanya melekat dalam fungsi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif beralih menjadi fungsi organ tersendiri yang bersifat independen. Oleh sebab itu, lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi yang bersifat campuran dan independen (*independen bodies*).

Salah satu lembaga independen yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan diatur dalam undang-undang. Akan tetapi pengaturannya berkaitan erat dengan delegasi pengaturan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi *constitutional importance* yang setara dengan lembaga lain yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan suatu lembaga tidak dianggap lebih penting dari lembaga lain, hanya karena diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan yang lain belum diatur atau masih diatur dengan undang-undang (Jimly, 2010: 20-21).

KPK sebagai lembaga yang berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun justru mempunyai fungsi “campur” dari ketiganya. Keberadaan Komisi Pemberantasan

Korupsi tidak berada di luar sistem ketatanegaraan melainkan justru secara yuridis ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan. Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan kewenangannya berdasarkan undang-undang dan independen, serta mandiri dari pengaruh lembaga negara lain (*main organ*).

C. Landasan Teori

1. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian atau pemisahan kekuasaan negara merupakan prinsip yang fundamental dalam sebuah negara hukum. Selain karena berfungsi membatasi kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara, pemisahan kekuasaan negara juga untuk mewujudkan spesialisasi fungsi dalam rangka mencapai efisiensi yang maksimum, sesuai dengan tuntutan zaman yang modern (Sirajuddin dan Zulkarnaen, 2006: 23).

Teori mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagaimana posisi atau keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Gagasan mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan mendapatkan dasar pijakan antara lain dari pemikiran John Locke dan Montesquieu (Bambang dan Sri, 2004: 17). Pendapat kedua ahli tersebut ialah sebagai berikut.

a. John Locke

Dalam bukunya yang berjudul “*Two Treaties of Government*”, John Locke mengusulkan agar kekuasaan di dalam negara itu dibagi-bagi kepada organ-organ negara yang berbeda. Menurut John Locke agar pemerintahan tidak sewenang-wenang harus ada pembedaan pemegang kekuasaan dalam negara ke dalam tiga macam kekuasaan, yaitu:

- 1) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang)
- 2) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang)
- 3) Kekuasaan Federatif (melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain)

b. Montesquieu

Dalam bukunya “*L’esprit des Lois*”, Montesquieu pada tahun 1748 menawarkan alternatif yang agak berbeda dari yang ditawarkan oleh John Locke. Menurutnya untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang), kekuasaan eksekutif (pelaksana undang-undang), kekuasaan yudikatif (peradilan/kehakiman untuk menegakan perundang-undangan kalau terjadi pelanggaran). Ketiga poros kekuasaan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Ajaran tentang pemisahan kekuasaan ke dalam tiga pusat kekuasaan dari Montesquieu

kemudian oleh Immanuel Kant diberi nama *Trias Politica* (Moh.Mahfud MD, 1993: 82-83).

Jika dibandingkan antara pendapat Locke dan Montesquieu, terdapat perbedaan sebagai berikut.

- a. Menurut Locke, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif, karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sedangkan kekuasaan federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri.
- b. Menurut Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sedangkan kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.

Dalam perkembangannya, ternyata cara pembedaan kekuasaan yang dilakukan oleh Montesquieu lebih dapat diterima. Akan tetapi dalam praktek ketatanegaraan, konsep *trias politica* sulit dilaksanakan secara murni dan konsekuen (Bambang dan Sri Hastuti, 2004: 18-19).

Teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu mendapat kritik karena tidak bisa dilaksanakan secara murni dan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan. E.Utrecht mengemukakan dua keberatan terhadap teori *trias politica* untuk dipraktikan seluruhnya dalam negara modern (E. Utrecht, 1986: 20-30). Keberatan tersebut antara lain :

- a. Pemisahan mutlak yang seperti dikemukakan Montesquieu, mengakibatkan adanya badan kenegaraan yang tidak dapat ditempatkan di bawah penguasaan suatu badan kenegaraan lain. Tidak ada pengawasan berarti kemungkinan suatu badan kenegaraan untuk melampaui batas kekuasaannya. Oleh sebab itu, kerja sama antara masing-masing badan kenegaraan dipersulit. Dengan demikian, tiap-tiap badan kenegaraan yang diberikan yang berlainan dalam negara perlu diberikan kesempatan untuk saling mengawasi.
- b. Dalam negara modern atau *welfare state*, tugas pemerintah bertambah luas untuk mewujudkan berbagai kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, tidak mungkin diterima asas teguh (*vast beginsel*) bahwa tiga fungsi tersebut masing-masing hanya boleh diserahkan kepada suatu badan kenegaraan tertentu. Ada banyak badan kenegaraan disertai lebih dari satu fungsi (kemungkinan untuk mengordinasi beberapa fungsi).

Walaupun ajaran Montesquieu mendapat kritikan, keberadaannya sangat penting karena substansi dari ajaran tersebut menghendaki kekuasaan dalam negara jangan sampai terpusat pada satu tangan (badan) karena akan melahirkan kesewenang-wenangan. Kekuasaan tersebut harus dibagi sehingga hak asasi warga negara dapat terlindungi (Sirajuddin dan Zulkarnaen, 2006: 24).

Dalam suatu negara hukum modern, satu organ atau badan kenegaraan ini tidak hanya disertai satu fungsi kekuasaan saja. Kenyataan menunjukkan bahwa pembuat undang-undang yang seharusnya tugas legislatif, ternyata eksekutif juga diikutsertakan. Bahkan di Amerika Serikat yang dianggap kampiun dalam menjalankan konsep pemisahan negara, ternyata dalam praktik ketatanegaraannya dikenal sistem saling mengawasi dan saling mengadakan pertimbangan (*checks and balances system*) antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut. Adanya hak veto dari Presiden terhadap rancangan undang-undang yang diajukan konggres Amerika pada hakekatnya sudah mengurangi pelaksanaan teori *trias politica*, karena wewenang menetapkan undang-undang oleh legislatif (konggres) sudah dikurangi (Bambang dan Sri Hastuti, 2004: 18-19).

Menurut Kusnardi dan Bintan Saragih, Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*) tersebut. Pembuat Undang-Undang Dasar 1945 tidak menghendaki agar sistem pemerintahannya disusun berdasarkan ajaran *trias politica* dari Montesquieu, karena ajaran itu dianggap sebagai bagian dari paham liberal.

Soepomo selaku salah seorang perancang Undang-Undang 1945 berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Dalam pembagian kekuasaan dimungkinkan adanya kerja sama

antar lembaga-lembaga negara. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 (1) menunjukkan adanya kerja sama antara DPR dengan pemerintah dalam tugas legislatif (Bambang dan Sri Hastuti, 2004: 20).

Dalam suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada atau tidaknya *trias politica*, persoalannya adalah dapat atau tidaknya alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani dan otoriter. Hal ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan itu sendiri, melainkan kepada adanya sendi negara demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan rakyat dalam teori dan dilaksanakan dalam praktek, maka sewaktu-waktu rakyat baik secara langsung maupun tidak, dapat menyatakan pendapatnya terhadap kekuasaan negara secara terbuka dan efektif (Didi Yazmi, 1992: 59).

Indonesia merupakan negara yang menganut paham *trias politica*. *Trias politica* yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif (Jimly, 2012: 29). Pengaruh gagasan Montesquieu sangat mendalam dalam cara berpikir banyak sarjana, seringkali sangat sulit melepaskan diri dari pengertian bahwa lembaga negara itu selalu terkait dengan tiga cabang alat-alat perlengkapan negara.

Sehubungan dengan teori pembagian kekuasaan, (Soehino, 2010: 29) berpendapat :

Teori Pembagian Kekuasaan tidak terlepas dari konsep *trias politica*. Konsep *trias politica* Montesquieu yang banyak mendapat pengaruh dari pemikiran John Locke mengatakan bahwa kekuasaan Negara dipisahkan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan Legislatif (kekuasaan perundang-undangan), Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan pemerintahan) dan kekuasaan yudikatif (kekuasaan Kehakiman).

Ajaran tentang pemisahan atau pembagian kekuasaan negara, merupakan ajaran yang menghendaki agar masing-masing lembaga negara berdiri sendiri dengan peranan dan kekuasaannya sendiri-sendiri, sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam konstitusi. Pada dasarnya, suatu lembaga tidak boleh mempengaruhi atau bahkan mengintervensi lembaga lainnya.

Trias Politica atau pemisahan kekuasaan merupakan konsep pemerintahan yang banyak dianut di berbagai negara. Konsep dasarnya adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan hanya kepada satu struktur kekuasaan politik saja, melainkan harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Konsep ini bertujuan agar semua tugas atau kekuasaan tidak hanya dilimpahkan pada suatu kekuasaan tertinggi di suatu negara, melainkan kekuasaan tersebut dibagi-bagi kedalam beberapa lembaga yang terorganisir dalam sebuah struktur pemisahan kekuasaan.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional

yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, serta adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.

Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara Hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Konsep negara hukum merupakan objek studi yang selalu aktual untuk dikaji. Perkembangan konsep negara hukum merupakan produk

dari sejarah penyebab munculnya suatu rumusan. Pengertian negara hukum tersebut terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia. Konsepsi negara hukum merupakan gagasan yang muncul untuk menentang konsep absolutisme yang telah melahirkan negara kekuasaan. Pada pokoknya, kekuasaan penguasaan (raja) harus dibatasi agar jangan memperlakukan rakyat dengan sewenang-wenang. Pembatasan itu dilakukan dengan jalan adanya supremasi hukum, yaitu bahwa segala tindakan penguasa tidak boleh sekehendak hatinya, tetapi harus berdasar dan berakar pada hukum, menurut ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku dan untuk itu juga harus ada pembagian kekuasaan negara, khususnya kekuasaan yudikatif harus dipisahkan dari penguasa (Mukhtie Fadjar, 2004: 7).

Munculnya gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM. Akar terjauh mengenai perkembangan awal pemikiran negara hukum adalah pada masa Yunani Kuno yang dikemukakan oleh Plato ketika mengintroduksi konsep *nomoi*. Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan Plato kemudian didukung oleh pendapat Aritoteles. Aritoteles berpendapat bahwa, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu suatu pemerintahan yang dilaksanakan :

- a. Untuk kepentingan umum.

- b. Menurut hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi.
- c. Atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan yang dilaksanakan oleh pemerintahan despotik.

Apabila ditelusuri kebelakang, paham negara hukum sebetulnya merupakan konsep yang sudah lama menjadi *discourse* para ahli. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dipandang sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Sedangkan Aritoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam perumusannya yang masih terkait pada *polis*. Bagi Aritoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum (Kusnardi dan Harmaily, 1980: 142).

SF. Marbun berpendapat bahwa, negara hukum adalah reaksi dari pemerintahan absolut sebagai perjuangan untuk menegakkan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia guna menghapuskan sistem pemerintahan absolut itu sendiri (SF Marbun, dkk, 2011: 15). Kemudian, R supomo berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum juga akan menjamin tertib hukum dalam masyarakat

yang artinya memberikan perlindungan hukum sehingga antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik (Mukhtie Fadjar, 2004: 7).

Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa paling tidak ada sebelas prinsip pokok yang terkandung dalam negara hukum yang demokratis, yakni :

- a. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama.
- b. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas.
- c. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama itu.
- e. Adanya pengakuan dan persamaan terhadap hak asasi manusia.
- f. Adanya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horisontal.
- g. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan keputusan tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.

- h. Adanya lembaga peradilan yang dibentuk khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat keputusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
- i. Adanya mekanisme *judicial review* oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.
- j. Dibuatnya konstitusi dan dibuatnya perundang-undangan yang mengatur jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.
- k. Adanya pengakuan terhadap asas legalitas atau *due process of law* dalam keseluruhan sistem penyelenggara negara (Jimly, 2005: 299-300).

Dalam konsep negara hukum selanjutnya, muncul istilah *rechtsstaat* yang banyak di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtsstaat* ini dikemukakan oleh Frederick Julius Sthal. Ia menyatakan bahwa dalam negara hukum terdapat beberapa unsur utama secara formal, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.
- b. Untuk melindungi hak asasi manusia maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada trias politica.
- c. Pemerintah menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*).
- d. Apabila pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan undang-undang masih melanggar hak asasi manusia,

maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya. Berbeda dengan negara Eropa kontinental, negara-negara Anglo-Saxon menyebutnya sebagai *the rule of law* yang dipelopori oleh A.V.Dicey (Inggris). Menurut Dicey, konsep *the rule of law* ini menekankan pada tiga tolak ukur meliputi supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights* (Titik Triwulan, 2007: 30).

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Negara yang menggunakan sistem *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan negara yang menggunakan sistem *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law* (Philipus Hadjon, 1987: 82).

Tipe-tipe negara hukum terbagi lagi dalam beberapa jenis, di antaranya adalah negara polisi. Tipe negara hukum ini dipengaruhi oleh aliran merkantilisme. Pada zaman ini hukum administrasi negara belum dikenal, karena segala sesuatu ditentukan oleh raja. Walaupun

mungkin ada hukum administrasinya, namun boleh dikatakan belum berperan sebagaimana mestinya.

Bentuk atau tipe negara yang kedua adalah negara hukum formal, sering disebut negara hukum dalam arti formal. Perkembangan terakhir dari bentuk negara ini, menunjukkan bahwa negara sudah campur tangan, dalam kehidupan masyarakat meskipun masih sangat terbatas. Hukum administrasi sudah berperan dalam negara hukum ini. Bentuk tipe negara selanjutnya adalah negara hukum, dalam arti materil biasanya disebut negara hukum dalam arti luas, atau negara kesejahteraan. Negara dipandang bukan semata-mata menjaga keamanan, tetapi aktif turut serta dalam urusan kemasyarakatan demi kesejahteraan rakyat. Dalam tipe negara ini, hukum administrasi negara sangat berperan aktif atau dominan (SF.Marbun dan Harmaily, 1980: 15-16).

Pada masa sekarang ini hampir semua negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan (Ridwan, 2006: 21-22). Indonesia sendiri menerapkan konsep negara hukum Pancasila, seperti dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon (Philipus Hadjon, 1987: 30) :

“Adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia, secara intristik melekat pada pancasila dan bersumber pada pancasila.”

Bertitik tolak dari falsafah negara pancasila tersebut, Hadjon kemudian merumuskan elemen atau unsur-unsur negara hukum pancasila sebagai berikut :

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
 - b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan negara.
 - c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
 - d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
3. Teori Pemerintahan yang baik

Istilah “asas-asas umum pemerintahan yang baik”, pada mulanya diperkenalkan oleh komisi De Monchy di Belanda. Dalam laporan itu, digunakan istilah *Algemene Beginselen Van Behoorlijke Bestuur*, yang berkenaan dengan usaha peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah. Setelah itu dipakai oleh Van der Griten dalam laporan tentang peradilan administrasi dan peradilan pelanggaran-pelanggaran disiplin dalam organisasi perusahaan. Istilah “asas-asas umum pemerintahan yang baik” dalam bahasa inggris disebut *general principles of administration* (Zulkarnaen dan Beni, 2012: 278-279)

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai

persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 undang-undang ini dirumuskan sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari:

a. Asas Kepastian Hukum

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

f. Asas Profesionalitas

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN merumuskan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut secara formal mengikat penyelenggara negara untuk dilaksanakan dalam tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan negara yang dijalankan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menghindarkan negara dari pemerintahan yang bebas dari korupsi. (<http://studihukum.blogspot.com/2011/02/urgensi-partisipasi-publik-dalam.html>).